



KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan tuntunannya saja, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dapat disusun dan diselesaikan.

Dalam mewujudkan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan arah Otonomi dan tugas Pembantuan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tentunya disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Kepulauan Talaud periode 2025-2029.

Disadari Rencana Kerja (RENJA) ini Tahun 2026 ini memiliki keterbatasan serta masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukkan sebagai koreksi dapat kami harapkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) selanjutnya.

Atas segala petunjuk dalam penyelesaian Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih.

Melonguane, Juli 2026

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepl. Talaud



STHELIA BENTIAN, S.Si., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

N.P. 19811203 200312 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	8
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	16
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	16
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	16
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo 2026	20
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya, Hasil Evaluasi Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renja

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 2025-2029 dan berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Penyusunan Renja Perubahan dilaksanakan karena adanya Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029 yang berbasis hasil atau outcome. Dengan adanya Renstra Tahun 2020-2025 maka terjadi perubahan pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan adanya Renstra ini maka dilaksanakan perubahan Renja Tahun 2026 yang sudah disesuaikan dengan Renstra, pohon kinerja serta IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 13. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Utara;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 19. Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029
 21. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program kegiatan
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025

BAB III Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran renja serta program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2024 berdasarkan target indikator kinerja program Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai pagu anggaran sebesar **3.183.261.289,-** (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Taiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 5 (lima) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan. Untuk evaluasi hasil pelaksanaan Renja dilihat pada Tabel T-C. 29 pada Lampiran 1.

Tabel T-C.29.**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
(lampiran 1)**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kepulauan Talaud Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023(tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2027 (tahun n+3)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
1	INDEKS SPBE			>2,25	2,16	2,5			2,18	2,09	2,5	3	
2	% KONTEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPATKAN RESPON POSITIF DARI MASYARAKAT			40%	50%	60%			100%	100%	100%		

3	% PD YANG TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DENGAN SARANA PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK			55%	60%	65%			100%	100%	65%		
	% KECAMATAN YANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA BAIK DENGAN SARANA DAN PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK			31,57%	47,36%	63,15			15,79%	47,36	63,15		
4	% DATA STATISTIK DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH			100	100	100			82,61%	82,61%	100%		

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada bidang Penyelenggaraan E-Government adalah:
 - a. Belum terbangunnya Command Center dan jaringan intra pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE ;
 - b. Tidak tersedianya infrastruktur yang menunjang penyelenggaraan layanan E-Government di Kecamatan;
 - c. Kurangnya Sumber daya TIK di Bidang Penyelenggaraan E-Government ;
 - d. Minimnya anggaran yang tersedia untuk Penyelenggaraan Layanan E-Government sehingga Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan E-Government tidak optimal;
 - e. Penempatan Pejabat tidak sesuai dengan kompetensi sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan E-Government
 - f. Tidak ada koordinasi antar lintas SKPD dalam pelaksanaan layanan e-government
2. Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah:
 - a. Minimnya ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Rendahnya kualitas SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Belum optimalnya pengetahuan tentang implementasi peraturan perundang undangan tentang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Belum tersedianya layanan Informasi Publik;
 - e. Belum tercapainya pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap Kecamatan termasuk Desa;
 - f. Belum tersedianya sarana dan prasarana peliputan berita daerah;
 - g. Layanan Website Pemda yang masih dalam pengembangan;.
3. Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada bidang Statistik dan Persandian adalah:
 - a. .Minimnya ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Statistik dan Persandian;
 - b. Rendahnya kualitas SDM Bidang Statistik dan Persandian;
 - c. Tidak tersedianya sarana dan prasarana persandian
 - d. Tidak adanya pejabat eselon IV untuk Seksi Persandian dan Seksi Statistik Daerah dan Kemitraan

Dari permasalahan di atas maka, Isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kriteria, sebagai

berikut:

1. Terciptanya Jaringan Internet yang memadai di Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan maupun Desa;
3. Meningkatnya SDM TIK di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Terlaksanannya pengembangan Website Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Terlaksananya peliputan berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
6. Meningkatnya kualitas SDM sesuai Standar Kualifikasi Statistik dan Persandian;
7. Terciptanya sistim persandian Daerah yang baik;
8. Tersedianya Data Statistik Sektorial Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dihadapi antara lain :

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

- a. Permenkomnfo No. 8 Tahun 2010 tentang KIM;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Informasi publik;
- i. Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah terkait dalam pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi;
- j. Website Pemda sebagai sarana penyampaian informasi daerah;
- k. Kemitraan dengan BPS dalam penyusunan data statistik sektoral.;
- l. Hubungan dengan BSSN dan Lembaga Sandi Negara dalam penyediaan peralatan Persandian dan Pelatihan SDM;

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM;

- b. Belum tersedianya sarana prasarana TIK .
- c. Belum terlaksananya SPBE dengan optimal
- d. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD;
- e. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- f. Belum Optimalnya pengembangan aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi
- g. Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh masyarakat;
- l. Nomenklatur Dinas yang membidangi komunikasi informasi Kab/Kota tidak sama dengan provinsi, sehingga kurangnya sinergitas pelaksanaan program pembangunan ;
- p. Kurangnya link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja;
- q. Tenaga fungsional/teknis belum ada;
- r. Belum optimal pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Persandian
- s. Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- t. Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam mendukung kinerja program dan kegiatan prioritas baik itu bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

3. PELUANG (OPPORTUNITIS)

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan system informasi komunikasi sebagai yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya melalui komunikasi informasi masyarakat (KIM);
- c. Kepedulian Pimpinan terhadap komunikasi informasi;
- d. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk untuk didayagunakan
- e. Kebutuhan kualitas pelayanan public
- f. Kebutuhan pengembangan muatan E-Government
- g. Dibutuhkan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
- h. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja
- g. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media informasi
- h. Tersedianya Peraturan perundang-undangan yang mendasari tentang regulasi bidang kominfo

4. ANCAMAN (THREATS)

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;

- b. Kesenjangan informasi masyarakat;
- c. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi
- d. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
- e. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
- f. Bentuk kelembagaan kominfo di daerah yang beragam
- g. Kemajuan teknologi informasi yang beragam;
- h. SDM TIK belum memadai;
- i. Kompetensi dan daya saing kerja masih rendah;

Dalam melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, maka dapat dilakukan penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.
Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.
3. Meningkatnya jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Strategi ini dilakukan dengan membentuk dan memberikan pembinaan dan pengawasan informasi bagi masyarakat luas.
4. Meningkatnya kontribusi Pemerintah terhadap Informasi Komunikasi
Strategi ini dilakukan dengan memberikan fasilitas bagi peningkatan akses jaringan internet dari Pemerintah, dan Database informasi setiap tahunnya.
5. Meningkatnya kualitas SDM melalui pelatihan peningkatan TIK.
Strategi ini dilakukan dengan percepatan terciptanya kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan peningkatan TIK (berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan),
6. Optimalisasi pembinaan terhadap aparatur dalam rangka menerapkan peraturan tentang informasi komunikasi.
Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta dalam hal penyediaan informasi, komunikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
(Lampiran 2)**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C. 32.

**Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrembang Kecamatan Kepada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Talaud
Tahun 2026**

NO	PROGRAM / KEGIATAN (Kegiatan Prioritas)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA			CATATAN
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan BTS 4G	Desa Peret Kecamatan Damau	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
2	Pembangunan BTS 4G	Desa Birang Kecamatan Damau	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
3	Pembangunan BTS 4G	Desa Balang Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
4	Pengadaan Internet Sekolah	SDK Torsina Bitunuris Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
5		SDN Inpres Bitunuris Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
6		SDN Inpres 4/82 Dalam Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
7		SDN Inpres Balang Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
8		SDK Maranatha Salibabu Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
9		SMP Negeri 3 Lirung Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
10		SMP Negeri 6 Lirung Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
11	Pembangunan BTS 4G	Kantor Camat Salibabu Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
12	Pembangunan BTS 4G	Desa Dalam Kecamatan Salibabu	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
13	Pembangunan BTS 4G	Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
14	Pembangunan BTS 4G	Desa Moronge Selatan I Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
15	Pembangunan BTS 4G	Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	

16	Pembangunan BTS 4G	Kantor Camat Moronge Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
17	Pengadaan Internet Sekolah	SDN Moronge Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
18		SD Inpres Moronge Selatan Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
19		SDK Moronge Selatan I Kecamatan Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
20		SMP Negeri Moronge	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
21	Pembangunan BTS 4G	Kantor Camat Miangas Kecamatan Miangas	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
22	Pengadaan Internet Sekolah	SDN Miangas Kecamatan Miangas	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
23	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Miangas Kecamatan Miangas	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
24	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Mamahan Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
25	Pembangunan BTS 4G	Kantor Bambang Mamahan Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
26	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Malat Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
27	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Gemeh Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
28	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Gemeh Roamata Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
29	Pembangunan BTS 4G	Kantor Desa Wantano Kecamatan Gemeh	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
30	Pengadaan Internet Sekolah	SDN Inpres Arangkaa Kecamatan Miangas	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
31	Pembangunan BTS 4G	Desa Sereh Kecamatan Lirung	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
32	Pengadaan Internet Sekolah	SDN Inpres Desa Sereh Kecamatan Lirung	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
33	Pembangunan BTS 4G	Kantor Camat Beo Kecamatan Beo	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
34	Pembangunan BTS 4G	Desa Ambia Kecamatan Beo Utara	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
35	Pengadaan Internet Sekolah	SMP Advent Ambia Kecamatan Beo Utara	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	

36	Pembangunan BTS 4G	Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
37	Pembangunan BTS 4G	Desa Karatung Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
38	Pembangunan BTS 4G	Kantor Camat Nanusa Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
39	Pembangunan BTS 4G	Desa Karatung Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
40	Pembangunan BTS 4G	Desa Karatung Tengah Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
41	Pembangunan BTS 4G	Desa Laluhe Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Unit	3.000.000.000			APBN	
42	Pengadaan Internet Sekolah	SDN Inpres karatung Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
43	Pengadaan Internet Sekolah	SDK Imanuel karatung Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	
44	Pengadaan Internet Puskesmas	Puskesmas Karatung Kecamatan Nanusa	Wilayah yang terlayani jaringan Internet	1 Paket	500.000.000			APBN	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Kebijakan Nasional****3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional**

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud mendukung penyelenggaraan Asta Cita pada poin ke 7. yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba melalui tugas pokok bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat langkah - langkah untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 - 2029 yaitu :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG
BERMARTABAT, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA”.**

Maka untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud adalah

3.2.1. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang dapat diukur. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 adalah :

Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Elektronik, Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*OUTCOME*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Yang Berkualitas;
2. Terciptanya Masyarakat Yang Responsif Terhadap Layanan Komunikasi Dan Informasi Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya Akurasi Data Statistik Dan Informasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Yang Valid Dan Berkualitas

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada Visi yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERMARTABAT, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud mendukung pencapaian Misi : Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Transparan Dan Akuntabel

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun 2026 telah merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 (lampiran 3)

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026**

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, Statistik serta persandian dan statistik.

Adapun Alokasi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel yang di bawah ini.

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome / Output	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3				17	17
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35	259.300.000,00		
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah Diseminasi dan layanan Informasi publik sesuai Strakom (strategi komunikasi dan SOP)</i>	500	259.300.000,00		
Relasi Media					

	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10 Laporan/ Media	20.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	7 Komunitas	31.300.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	150.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pelayanan Informasi Publik					
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	50.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					

	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	7 Rekomendasi	22.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pengelolaan Media Komunikasi Publik					
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	10 Media	360.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyusunan Konten					
	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	20.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	459.625.113,00		
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	6,90			

	% Nama Domain dan Sub Domain yang diKelola	50,00			
	Presentase Indikator SPBE yang terpenuhi	60,00			
<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang diKelola</i>	50,00	33.600.000,00		
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	83 Dokumen	33.600.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Indikator SPBE yang terpenuhi	47	426.025.113,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	6,90			
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	20.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	10.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	25.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	16.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Akses Internet					
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	29 Perangkat Daerah	250.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					

	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL / Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	56.385.000		
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%			
<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data statistik sektoral berkualitas yang mendukung tugas pemerintah dalam pembangunan di perangkat daerah</i>	22	56.385.000		
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	70%	4.315.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70%	15.120.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	70%	7.800.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	103 orang	14.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	70%	8.400.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	6.750.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI / Meningkatnya keadaan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	25%	98.200.000		
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sistem dan infrastruktur Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai standar keamanan</i>	2	76.600.000		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					
	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	30.000.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					
	Jumlah Laporan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	21.600.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	18 Perangkat Daerah	5.000.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					

	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	3 regulasi	20.000.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang aktif terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi	51 OPD	21.600.000		
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	51 OPD	21.600.000	Kabupaten Kepulauan Talaud	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029.

Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten beranda terdepan di Indonesia, isi dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud .

Semoga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Melonguane, Juli 2025

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepl. Talaud



SHELIA F. BENTIAN, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19811203 200312 2 007-

Tabel T-C. 29 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	inerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
											8=7/6	9	10=(5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
			3	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota									
			01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah kunjungan berita, konten website resmi pemda Kab. Kepl. Talaud	4500 Kunjungan	532 kunjungan	500 Kunjungan	1305 kunjungan	261%	800 kunjungan	2.637	59%
					Terlaksana Dialog Opini Publik	12 dialog	0 Dialog	0 dialog	0 dialog	0%	3 Dialog	3	25%
			02	Monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah terlaksana Analisis Media Massa	48 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	14 laporan	14	29%
			03	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penerbitan dan penyebarluasan informasi pembangunan Kab. Kepl. Talaud	135 Media	0 Media	30 Media	35 Media	117%	30 Media	65	48%
					Penyiapan bahan Komunikasi Pimpinan daerah/Bupati dan Wakil Bupati (Briefing notes, press release, dan Backgrounders)	155 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	20%	40 dokumen	41	26%
			04	Layanan Informasi Publik	Jumlah Analisis Berita dan pendapat Umum	12 Berita	3 berita	3 berita	3 berita	100%	4 berita	10	83%
			05	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Peliputan dan pendokumentasian Penyelenggaraan pembangunan Daerah	155 Konten	0 Konten	5 Konten	60 Konten	1200%	40 Konten	105	68%
			07	Layanan hubungan media	Jumlah Informasi Publik Yang disebarluarkan (Penyelenggaraan penyebarluasan Informasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	4500 berita	200 berita	500 Berita	4259 Berita	852%	800 Berita	5.259	117%
			08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Pelaksanaan forum bersifat internal	17 forum	0 forum	0 forum	1 forum	0%	0 forum	0	0%
			09	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Masyarakat paham pemanfaatan Laporan Publik ke SP4N-Lapor	19 orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	5 orang	5	26%
					Jumlah Aduan Masyarakat dan Penanganan Laporan	200 laporan	5 Laporan	20 Laporan	0	0%	40 laporan	45	23%
					Jumlah Wartawan mengikuti Uji Kompetensi	35 orang	0 Orang	0 Orang	0	0%	15 orang	15	42%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Inerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
											8=7/6	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Bimtek teknis	2 pelatihan	0 Pelatihan	0 Pelatihan	0	0%	1 pelatihan	1	50%			
	10	Penyediaan /pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaranaan Perlengkapan Video, Audio Pemancar, Kendaraan, Alat Komunikasi, Hardware dan Software media informasi	7 set	0 set	0 set	-	0%	6 set	6	86%		
	11	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat dan Komunitas Pengembangan digital	16 Kim	1 Kim	9 Kim	0	0%	12 Kim	13	81%		
		Jumlah telaksanan Monitoring dan evaluasi KIM yang terbentuk	16 Laporan	0 laporan	9 laporan	0	0%	12 Laporan	12	75%			
	12	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dialog Radio/ TV	4 dialog	0 dialog	4 dialog	0	0%	4 dialog	4	100%		
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										
2	16	3	2	1	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan daerah kabupaten/klota								
			01	Pendaftaran Nama Domain pemerintah	JUMLAH DOMAIN / SUB DOMAIN YANG TERDAFTAR : OPD	29 Domain	29 Domain	29 Domain	29 Domain	100%	29 Domain	29	100%
					RUMAH SAKIT	2 Domain	2 Domain	2 Domain	2 Domain	100%	2 Domain	2	100%
					KECAMATAN	19 Domain	19 Domain	19 Domain	19 Domain	100%	19 Domain	19	
					DESA	142 Domain	0 Domain	1 Domain	0 Domain	0%	142 Domain	142	100%
					KELURAHAN	11 Domain	0 Domain	0 Domain	0 Domain	0%	11 Domain	11	100%
					PUKESMAS	21 Domain	0 Domain	21 Domain	0 Domain	0%	21 Domain	21	100%
			02	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERKONEKSI DI INTRA PEMERINTAH	29	0	-	0%	29	29	100%	
					UNIT KERJA	29	0	0	0	0%	29	29	100%
					RUMAH SAKIT	2	0	0	0	0%	2	2	100%
					KECAMATAN	19	0	0	0	0%	19	19	100%
					DESA	1	0	0	0	0%	1	1	100%
					KELURAHAN	11	0	0	0	0%	11	11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Inerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
											8=7/6	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	ASN	183 Orang	0 Orang	0 Orang	11	1100%	61 Orang	72	39%				
		PERANGKAT DESA	426 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0%	142 Orang						
	09 Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten	JUMLAH SISTEM ELEKTRONIK YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH	24 Peraturan	0 Peraturan	3 Peraturan	0	0	6 Peraturan	6	25%				
	10 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	JUMALAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGARAKAN	1 Comand Center	0 Comand Center	0 Comand Center	0	0	1 Comand Center	1	100%				
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
2	20	2	2	1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten kota									
				1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pegolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah data di Perangkat Daerah yang diperbaharui sesuai jenis datanya	32 Dokumen	19 Dokumen	25 Dokumen	23	132%	25 Dokumen	25	78%
						Jumlah data yang dimiliki Perangkat Daerah	32 Dokumen	19 Dokumen	32 Dokumen	32	100%	32 Dokumen	32	100%
				2	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata (informasi atas data) yang dimiliki perangkat daerah	16 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	200%	1 Dokumen	3	19%
				3	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Layanan pusat data pemerintahan yang digunakan oleh perangkat daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32	100%	32 Dokumen	32	100%
						Jumlah Data dari Perangkat Daerah yang disimpan di pusat	32 Dokumen	20 Dokumen	32 Dokumen	32	100%	32 Dokumen	32	100%
						Jumlah data di Perangkat Daerah yang dapat berbagi pakai	32 Dokumen	18 Dokumen	32 Dokumen	34	106%	32 Dokumen	32	100%
						Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang dimiliki Perangkat Daerah	32 Dokumen	19 Dokumen	32 Dokumen	58	181%	32 Dokumen	32	100%
				4	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statisk Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pengelola Statistik Sektoral yang berkualitas	204 orang	2 orang	204 orang	53	26%	204 orang	204	100%
						ASN	62 orang	2 orang	62 orang	53	85%	62 orang	62	100%
						Perangkat Desa	142 orang	0 orang	142 orang	0	0%	142 orang	142	100%
				5	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata (informasi atas data) yang dimiliki perangkat daerah	32 Dokumen	12 Dokumen	32 Dokumen	0	0%	32 Dokumen	32	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Inerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
											8=7/6	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	200%	1 Dokumen	1	100%		
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	200%	1 Dokumen	1	100%		
			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	200%	1 Dokumen	1	100%		
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	200%	1 Dokumen	1	100%		
	7	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	32 Dokumen	16 Dokumen	32 Dokumen	32	200%	32 Dokumen	32	100%		
			Jumlah data statistik yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	32 Dokumen	18 Dokumen	32 Dokumen	32	100%	32 Dokumen	32	100%		
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
2	21	2	1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah									
			1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai area keamanan informasi Perangkat Daerah berdasarkan indeks KAMI	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	0	0%	32 Dokumen	32	100%
					Jumlah kegiatan Strategis di Perangkat Daerah	32 laporan	23 laporan	23 laporan	21	91%	23 laporan	23	72%
					Jumlah area penilaian di Perangkat Daerah	32 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0%	32 dokumen	22	100%
			2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Elektronik (SE) yang dimiliki Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau aplikasi penyandian	2 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0	0%	2 Sertifikat	2	100%
					Sistem Elektronik (SE) yang dimiliki Perangkat Daerah yang telah diaudit dengan kategori resiko rendah	1 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0	0%	1 Sertifikat	1	100%
			3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Elektronik (SE) yang dimiliki Perangkat Daerah yang diamankan sertifikat elektronik	10 Sertifikat	2 Sertifikat	2 Sertifikat	2	100%	2 Sertifikat	2	100%
						1 Set Alat Sandi	0 Set Alat Sandi	0 Set Alat Sandi	0	0%	1 Set Alat Sandi	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	inerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024(n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
											8=7/6	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	4	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah titik di Perangkat Daerah yang teramankan	22 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0	0%	2 Laporan	3	14%		
			Jumlah kegiatan Strategis di Perangkat Daerah yang teramankan	22 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	0%	2 Laporan	2	6%		
2	21	2	2	2	Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	Jumlah regulasi dan terlaksana jaring komunikasi pemerintah daerah							
			1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi dalam bentuk Jaring Komunikasi Sandi	32 OPD	0 OPD	1 OPD	0	0%	32 OPD	32	100%

Melonguane, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik
Kabupaten Keplauan Talaud,



SHEILA F. BENTIAN, S.Si., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19811203 200312 2 007

Tabel T.C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome / Output	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju (Rencana Tahun 2027)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3		17			17	17		17	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN									
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		35	259.300.000,00			38	798.300.000,00	
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah Diseminasi dan layanan Informasi publik sesuai Strakom (strategi komunikasi dan SOP)</i>		500	259.300.000,00			600	798.300.000,00	
Relasi Media									
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kabupaten Kepulauan Talaud	10 Laporan/Media	20.000.000,00	DAU		12 Laporan/Media	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kabupaten Kepulauan Talaud	7 Komunitas	31.300.000,00	DAU		7 Komunitas	31.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Laporan	150.000.000,00	DAU		1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pelayanan Informasi Publik									
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Permohonan	50.000.000,00	DAU		1 Permohonan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Talaud	7 Rekomendasi	22.000.000,00	DAU		8 Rekomendasi	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kabupaten Kepulauan Talaud	10 Media	360.000.000,00	DAU		12 Media	432.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyusunan Konten									
	Jumlah Konten Informasi Publik	Kabupaten Kepulauan Talaud	500 Konten	20.000.000,00	DAU		600 Konten	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		80	459.625.113,00			90	820.700.000,00	
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika		6,90				50		
	% Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola		50,00				75		
	Presentase Indikator SPBE yang terpenuhi		60,00				70		
<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola</i>		50,00	33.600.000,00			75	50.700.000,00	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Kepulauan Talaud	83 Dokumen	33.600.000,00	DAU		125 Domain dan Sub Domain	50.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPBE yang terpenuhi	Kabupaten Kepulauan Talaud	47	426.025.113,00	DAU		47	770.000.000,00	#REF!
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas		6,90				50		
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Dokumen	20.000.000,00	DAU		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Kepulauan Talaud	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	DAU		29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Layanan	10.000.000,00	DAU		6 Layanan	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kabupaten Kepulauan Talaud	3 Aplikasi	25.000.000,00	DAU		6 Aplikasi	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan									
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Talaud	3 Aplikasi	16.000.000,00	DAU		6 Aplikasi	32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Akses Internet									
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kabupaten Kepulauan Talaud	29 Perangkat Daerah	250.000.000,00	DAU		56 Perangkat Daerah dan UPTD	483.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU		4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL / Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	56.385.000			100%	59.465.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%				100%		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral berkualitas yang mendukung tugas pemerintah dalam pembangunan di perangkat daerah		22	56.385.000			24	59.465.000	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional									
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kabupaten Kepulauan Talaud	70%	4.315.000	DAU		75%	5.415.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia									
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kabupaten Kepulauan Talaud	70%	15.120.000	DAU		75%	16.200.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral									
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kabupaten Kepulauan Talaud	70%	7.800.000	DAU		75%	8.400.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	103 orang	14.000.000	DAU		103 orang	14.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kabupaten Kepulauan Talaud	70%	8.400.000	DAU		75%	8.700.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Laporan	6.750.000	DAU		1 Laporan	6.750.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI / Meningkatkan keadaan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah		25%	98.200.000			56%	74.000.000	
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sistem dan infrastruktur Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai standar keamanan</i>		2	76.600.000			2	62.000.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kepulauan Talaud	2 Laporan	30.000.000	DAU		2 Laporan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan									
	Jumlah Laporan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Laporan	21.600.000	DAU		1 Laporan	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kabupaten Kepulauan Talaud	18 Perangkat Daerah	5.000.000	DAU		22 Perangkat Daerah	7.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Kabupaten Kepulauan Talaud	3 regulasi	20.000.000	DAU		3 regulasi	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah perangkat daerah yang aktif terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi</i>		51 OPD	21.600.000			51 OPD	12.000.000	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kabupaten Kepulauan Talaud	51 OPD	21.600.000	DAU		51 OPD	12.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Melonguane, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Talaud,



STHELA F. BENTIAN, S.Si., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19811203 200312 2 007